

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Terminologi *Good Corporate Governance* mulai muncul pada tahun 1998. Tidak hanya pada bidang pemerintahan tetapi juga pada bidang swasta. *Good Corporate Governance* pada bidang pemerintahan dewasa ini menjadi acuan dalam mencari cara perbaikan birokrasi dan transparansi.

*Good Corporate Governance (GCG)* merupakan kondisi ideal yang di harapkan terwujud pada setiap aspek pemerintahan yang berinteraksi pada masyarakat. Tujuan pokok *good corporate governance* adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua pihak atau *stakeholders*. Prinsip *GCG* meliputi prinsip transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintahan, lingkungan ekonomi dan sosial, prinsip partisipasi yaitu pengambilan keputusan yang demokratis, kebebasan pers dan kebebasan mengemukakan aspirasi masyarakat serta prinsip terakhir adalah akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang di bebankan.

*Good corporate governance* dalam bidang pemerintahan akan menjamin masyarakat mendapat pelayanan publik yang baik dan pengelolaan instansi yang transparan. *GCG* didalam pemerintahan desa juga berperan dalam

menciptakan iklim yang kondusif sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab

Desa adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintahan kabupaten/kota. Kedudukan desa sangat penting sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga pemerintahan yang memperkuat struktur pemerintahan negara. Aparat pemerintahan desa memegang peran yang sangat penting demi terciptanya tata pemerintahan yang baik di desa.

Pemerintahan desa merupakan perangkat atau organ negara yang menyelenggarakan pemerintahan desa. Perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintah desa terdiri dari unsur pimpinan yaitu kepala desa, unsur pembantu kepala desa yaitu sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Pendampingan dan perhatian terhadap penyelenggaraan atau tata kelola pemerintahan desa yang baik sangatlah mendesak untuk dilakukan. Sungguhpun demikian urgensinya sangat jarang di komunikasikan di arena publik. Perhatian terhadap pemerintah desa walaupun ada bersifat sangat marginal. Padahal desa inilah ruang publik yang paling dekat untuk di akses oleh masyarakat.

Instansi yang memastikan pelaksanaan GCG pada pemerintahan desa adalah Inspektorat Daerah. Inspektorat mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah. Selain fungsi pengawasan, inspektorat juga memiliki fungsi pembinaan yang di harapkan mampu meningkatkan kompetensi pemerintahan desa dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Salah satu fungsi utama inspektorat adalah melakukan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Proses pengendalian internal akan di tuangkan kedalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang akan ditindak lanjuti oleh kepala daerah. Termasuk menjadikan LHP sebagai dasar pembinaan terhadap pemerintahan desa tersebut pada masa mendatang.

Pada Bulan Juli 2020 inspektorat daerah kabupaten Pringsewu meraih level 3 kapabilitas Sistem Pengendaliann Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dari level tertinggi adalah level 4. Tidak banyak daerah di Propinsi Lampung yang sudah dapat meraih level 3. Hal ini merupakan sebuah prestasi dari kinerja Inspektorat Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya. Inspektorat mempunyai tantangan untuk meningkatkan level SPIP dan APIP ke level tertinggi melalui peningkatan kinerjanya

Berdasarkan latar belakang tersebut maka potensi inspektorat daerah di Pringsewu dalam mengoptimalkan kinerja aparatur pemerintahan desa perlu di tingkatkan sehingga, pelaksanaan GCG pada pemerintahan desa dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran Inspektorat Daerah dalam membangun GCG agar kinerja aparatur pemerintah desa menjadi lebih optimal.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan maka identifikasi masalah dijabarkan dalam pernyataan sebagai berikut:

Bagaimanakah peran Inspektorat Daerah dalam membangun *Good Corporate Governance* terhadap Pengoptimalan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa?

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Peran Inspektorat Daerah Dalam Membangun *Good Corporate Governance* Terhadap Pengoptimalan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa**”.

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* dan Kinerja.
2. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Aparatur Pemerintah Desa.
3. Waktu penelitian 2021
4. Tempat atau lokasi yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian di Pekon Bulu Karto Kabupaten Pringsewu

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui peran Inspektorat Daerah dalam membangun *Good Corporate Governance* terhadap Pengoptimalan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan sudut pandang pemikiran yang baru seperti :

- 1) Bagi akademik: hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan referensi bagi civitas akademisi Universitas Muhammadiyah Pringsewu dalam bidang sumber daya manusia khususnya mengenai topik *good corporate governance* dan kinerja.
- 2) Bagi peneliti: penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dalam bidang sumber daya manusia khususnya mengenai topik *good corporate governance* dan keterkaitannya dengan kinerja aparatur Pemerintah Desa dan menggunakan pengetahuan ini dalam menunjang pekerjaan peneliti di Inspektorat Daerah Kabupaten Pringsewu.
- 3) Bagi pihak lain yang berkepentingan: penelitian ini dapat menjadi dasar dilakukannya penelitian lain mengenai *good corporate*

*governance* pada bidang pemerintahan dan keterkaitannya dengan variabel-variabel lain.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Pringsewu dan jajaran pimpinannya dalam meningkatkan kapabilitas inspektorat dan perannya dalam membangun GCG pada pemerintah desa.